

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Triwulan I yang berlangsung dari bulan Januari-Maret bertepatan dengan Hari Besar Keagamaan Nasional yaitu Tahun Baru Imlek yang jatuh pada tanggal 17 Februari 2026 dan bulan suci Ramadhan yang jatuh pada tanggal 19 Februari 2026 serta Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 19 Maret 2026. Pada Triwulan I ini juga masih berlangsung angin musim utara yang mengakibatkan angin kencang dan gelombang tinggi, namun Kabupaten Natuna bisa mengakomodir dengan baik sehingga tidak terjadi lonjakan harga signifikan, bahkan cenderung stabil dan ada beberapa komoditas seperti gula, minyak dan cabe merah mengalami kenaikan harga. Pada TW ini juga berlangsung angin musim utara yang mengakibatkan angin kencang dan gelombang tinggi, sehingga terjadi lonjakan harga pada beberapa komoditi diantaranya sebagai berikut:

No	Komoditi	Januari	Februari	Maret	Perubahan Harga (%)
1	Beras	16,500	16,500	16,000	- 0.03
2	Gula	18,214	18,286	18,429	0.01
3	Minyak Goreng	19,400	19,800	19,800	0.02
4	Tepung Terigu	15,071	15,071	15,071	-
5	Daging	140,000	140,000	141,429	0.01
6	Telur Ayam Ras	61,000	60,786	61,143	0.00
7	Cabe Merah	76,154	68,462	68,462	- 0.11
8	Bawang Merah Jawa	42,786	42,071	44,000	0.03
9	Kacang Kedelai	13,000	13,000	13,200	0.02

Dari tabel diatas menunjukkan harga barang kebutuhan pokok dan penting di Kabupaten Natuna tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan, perubahan harga tertinggi terjadi pada komoditas Cabe Merah yaitu sebesar 0.04%. Hal ini disebabkan karena cuaca ekstrim yang sempat terjadi dikarenakan angin musim utara yang berlangsung.

Bupati Natuna selaku Ketua TPID Kabupaten Natuna mendorong anggota TPID khususnya OPD untuk memperkuat dan mengoptimalkan strategi pengendalian inflasi melalui sinergi dan inovasi pada pilar 4K TPID, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Hal ini seiring dikeluarkannya Surat Edaran Bupati Natuna No: 500/EKON-SDA/80/2026 tentang Pengendalian Inflasi Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 H / 2026 M.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pemerintah Kabupaten Natuna menghadapi beberapa permasalahan dalam Pengendalian Inflasi Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Kabupaten Natuna merupakan daerah terluar dan terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terdiri dari banyak pulau dengan kondisi geografis yang tersebar memiliki tantangan dalam Pengendalian Inflasi Daerah dengan ketergantungan tinggi

terhadap pasokan bahan kebutuhan pokok dari luar daerah seperti Tanjungpinang, Batam, Jakarta dan Pontianak Kalimantan Barat. Kondisi geografis tersebut menyebabkan harga pangan dan barang kebutuhan strategis di Kabupaten Natuna sangat rentan terhadap gangguan distribusi, tingginya biaya logistik, serta faktor cuaca yang kerap memengaruhi kelancaran pasokan.

2. Kabupaten Natuna tidak termasuk daerah sentra produksi pangan strategis dimana hampir sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat masih dipasok dari luar daerah, sementara produksi lokal hanya terbatas pada beberapa komoditas tertentu dalam skala kecil seperti cabai dan hortikultura rumah tangga.
3. Keterbatasan infrastruktur logistik dan penyimpanan pangan yang terbatas menyebabkan kemampuan daerah dalam menjaga stok penyangga belum optimal, sehingga respon terhadap gejolak harga masih membutuhkan intervensi cepat dari Pemerintah Daerah.
4. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kemampuan fiskal daerah dalam melaksanakan berbagai kegiatan pengendalian inflasi menjadi terbatas. Kondisi tersebut berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan beberapa program dan kegiatan strategis yang sebelumnya direncanakan dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan di daerah.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan I Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melaksanakan berbagai kebijakan dan langkah strategis pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Pelaksanaan kebijakan difokuskan pada empat pilar utama, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

Kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan Pasokan.

Pemerintah Kabupaten Natuna berupaya menjamin ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui:

- a. Penguatan koordinasi dengan daerah pemasok utama seperti Batam dan Tanjungpinang dan Pontianak Provinsi Kalimantan Barat untuk menjamin kontinuitas pasokan pangan strategis.
- b. Dukungan terhadap peningkatan produksi pangan lokal melalui pemanfaatan lahan pekarangan, kegiatan pertanian terpadu, serta pengembangan komoditas hortikultura skala rumah tangga.
- c. Melaksanakan Koordinasi terkait Pengendalian dan Distribusi Perekonomian serta Pelaksanaan Monitoring dan Pengawasan Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan penting di beberapa Kecamatan dan Pengawasan Bahan Pokok dan penting.
- d. Pasokan dan ketersediaan barang kebutuhan pokok di Kabupaten Natuna sampai dengan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H terpantau dalam kondisi aman dan mencukupi, serta harga relatif stabil meskipun terdapat beberapa komoditas yang mengalami fluktuasi namun masih dalam batas wajar.
- e. Monitoring dan Koordinasi BBM di beberapa Kecamatan pada bulan Januari dan Februari 2026.

Keterjangkauan Harga.

Dalam rangka menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat, kebijakan yang dilaksanakan meliputi:

- a. Pelaksanaan Bazar Pangan Murah yang dilaksanakan pada Tanggal 10 Februari 2026 dan Operasi Pasar Murah yang dilaksanakan pada Tanggal 14 Februari 2026, khususnya menjelang hari besar keagamaan yaitu Imlek dan Ramadhan 1447 H.
 - b. Pengawasan harga di pasar tradisional dan swalayan serta toko-toko untuk mencegah lonjakan harga yang tidak wajar.
 - c. Fasilitasi stabilisasi harga komoditas tertentu melalui intervensi pasar bekerja sama dengan Bulog dan distributor.
3. Kelancaran Distribusi.

Untuk memastikan kelancaran distribusi barang dan menekan biaya logistik, Pemerintah Kabupaten Natuna melaksanakan:

- a. Koordinasi intensif dengan Dinas Perhubungan dan pelaku usaha transportasi laut guna mengantisipasi gangguan distribusi akibat kondisi cuaca ekstrem dan mudik lebaran Idul Fitri 1447 H.
 - b. Pemantauan arus distribusi barang dari daerah pemasok ke pasar-pasar di Kabupaten Natuna.
 - c. Upaya percepatan distribusi barang kebutuhan pokok pada saat terjadi keterlambatan pasokan akibat faktor alam.
4. Komunikasi Efektif.

Dalam mendukung efektivitas pengendalian inflasi, TPID Kabupaten Natuna memperkuat aspek komunikasi melalui:

- a. Pelaksanaan koordinasi TPID untuk pelaksanaan Bazar Pangan Murah dan Operasi Pasar Murah serta mengevaluasi perkembangan harga dan pasokan.
 - b. Penguatan Data & Statistik Dashboard inflasi berbasis data TPID yang disampaikan setiap hari pada Website Kemendagri <https://wasinflasi.kemendagri.go.id/login> 20 komoditas utama.
 - c. Penyampaian informasi harga dan ketersediaan barang kepada masyarakat melalui media informasi daerah.
 - d. Edukasi kepada masyarakat terkait pola konsumsi bijak dan pemanfaatan produk lokal.
5. Komunikasi Efektif.

Dalam upaya menjaga stabilisasi, ketersediaan dan keterjangkauan pasokan pangan di wilayah Kabupaten Natuna. Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna dan Perusahaan Umum (PERUM) Bulog melaksanakan kesepakatan bersama yaitu hibah tanah untuk pembangunan infrastruktur pasca panen PERUM BULOG di Kabupaten Natuna dengan luas tanah sebesar $\pm 30.000 \text{ m}^2$.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah Kabupaten Natuna pada Triwulan I Tahun

2026 secara umum berjalan cukup efektif, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan geografis. Evaluasi kebijakan dilakukan terhadap capaian dan kendala berdasarkan kerangka 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).

1. Ketersediaan Pasokan.

Kebijakan menjaga ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok menunjukkan hasil yang relatif stabil. Koordinasi dengan daerah pemasok dan pelaku distribusi mampu menjaga stok komoditas pangan strategis tetap tersedia hingga akhir bulan Maret 2026. Namun demikian, ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan dari luar daerah masih menjadi kelemahan utama, sehingga potensi gejolak harga tetap tinggi apabila terjadi gangguan distribusi. Upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan Ketahanan Pangan Lokal dengan meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan serta meningkatkan penangkapan ikan, dan budidaya ikan. Masyarakat perlu dilakukan pendampingan untuk meningkatkan hasil pertanian dan perikanan, baik budidaya maupun tangkap.

2. Keterjangkauan Harga.

Upaya menjaga keterjangkauan harga melalui operasi pasar murah dan pengawasan harga di pasar Ranai dinilai cukup efektif dalam menahan lonjakan harga, khususnya menjelang hari besar keagamaan. Meski demikian, fluktuasi harga pada komoditas tertentu seperti cabai, bawang, dan telur ayam ras masih terjadi akibat keterbatasan pasokan dan peningkatan permintaan musiman.

3. Kelancaran Distribusi.

Kebijakan pengendalian inflasi pada aspek distribusi menghadapi tantangan yang cukup signifikan, terutama akibat kondisi geografis kepulauan dan faktor cuaca ekstrem pada Triwulan I. Gangguan transportasi laut berdampak pada keterlambatan pasokan dan peningkatan biaya logistik. Meskipun koordinasi lintas sektor telah dilakukan, efektivitas distribusi masih perlu ditingkatkan melalui perbaikan sistem logistik dan sarana pendukung. Perlu dilakukan kerjasama dengan daerah lain untuk menampung hasil pertanian dan nelayan agar masyarakat memiliki daya dorong untuk semakin maju lagi dalam meningkatkan hasil pertanian dan perikanan.

4. Komunikasi Efektif.

Aspek komunikasi dinilai semakin baik melalui pelaksanaan rapat koordinasi TPID secara rutin dan penyampaian informasi perkembangan harga kepada masyarakat. Namun, pemanfaatan sistem pemantauan harga berbasis data real-time masih perlu dioptimalkan agar respon kebijakan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran. Rapat koordinasi yang dilakukan tim TPID sudah sangat baik namun perlu dimaksimalkan. Pemerintah Daerah perlu memperkuat sinergi dengan seluruh pihak baik TNI, Polri, lembaga BUMD, BUMN dan pengusaha untuk bekerja sama dalam menekan inflasi daerah dalam menghadapi cuaca eksterem yaitu musim utara yang berlangsung dari bulan Oktober 2025 sampai dengan Februari 2026.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi kebijakan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Natuna, maka merekomendasikan beberapa kebijakan Pengendalian Inflasi kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sebagai berikut :

1. Penguatan Koordinasi Distribusi Antarwilayah.

Diharapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat memperkuat koordinasi distribusi barang kebutuhan pokok antar kabupaten/kota, terutama dari daerah surplus ke Kabupaten Natuna, guna menjamin kelancaran pasokan dan stabilitas harga.

2. Dukungan Subsidi Transportasi dan Logistik.

Pemerintah Provinsi dan Pusat diharapkan dapat memberikan dukungan subsidi transportasi laut/logistik untuk komoditas pangan strategis menuju wilayah kepulauan dan perbatasan seperti Kabupaten Natuna, guna menekan biaya distribusi dan disparitas harga melalui subsidi angkutan laut.

3. Dukungan Anggaran dan Program Stabilisasi Harga.

Diperlukan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat untuk pelaksanaan operasi pasar, pasar murah, dan program stabilisasi harga komoditas pangan strategis di daerah dengan tingkat kerawanan inflasi tinggi.

4. Penguatan Peran Bulog di Daerah Terpencil.

Diharapkan kepada Pemerintah Pusat melalui Bulog untuk membangun gudang di beberapa Kecamatan terluar di Kabupaten Natuna seperti Serasan, Subi dan Pulau Laut dikarenakan kondisi geografis Natuna yang terdiri atas Pulau-pulau sehingga terbatasnya fasilitas penyimpanan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan pokok di wilayah perbatasan.

5. Peningkatan Infrastruktur Logistik dan Transportasi.

Diperlukan percepatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur transportasi laut, pelabuhan, dan fasilitas logistik pendukung di wilayah Natuna guna memperlancar distribusi barang dan menurunkan biaya logistik.

6. Diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau agar dapat mengalokasikan dukungan dana melalui APBD Provinsi Kepulauan Riau untuk pembangunan fasilitas Cool Storage (pendingin dan penyimpanan) dalam menjaga kualitas hasil perikanan, pertanian maupun pangan segar lainnya tetap awet dan tidak cepat rusak.

7. Pemerintah Pusat diharapkan dapat mengintegrasikan Kabupaten Natuna ke dalam program nasional ketahanan pangan dengan pendekatan berbasis potensi lokal, sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi secara bertahap.

8. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait agar dapat melakukan kebijakan penurunan harga tiket pesawat menuju dan keluar Kabupaten Natuna, mengingat sangat tingginya harga tiket pesawat yang mencapai Rp. 2.800.000, sangat berdampak pada mahalannya biaya distribusi barang dan jasa sehingga berpotensi memicu kenaikan harga barang kebutuhan pokok.